



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Udayana No. 4 Telp. (0370) 631060 – 632632 Fax. (0370) 634926

http://www.bpmntb.com, E-Mail : bpm_ntb@yahoo.co.id

MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Hidayat, S.STP.MAP
Jabatan : Sekretaris DPM & PTSP Provinsi NTB
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wahyu Hidayat, S.STP.MAP
Jabatan : Plt. Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

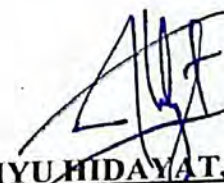
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT,


WAHYU HIDAYAT, S.STP.MAP
NIP. 19860331 200412 1 001

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPM & PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


WAHYU HIDAYAT, S.STP.MAP
NIP. 19860331 200412 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja DPM & PTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	A (83-85)

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1 Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 16.715.300,-
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Rp. 28.047.600,-
		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 29.208.780,-
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.869.268.330,-
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 10.320.000,-
		3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 8.241.200,-
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 12.884.900,-
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 25.226.000,-
		2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 16.387.200,-
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 7.214.700,-
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 27.400.000,-
		5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 57.750.000,-
		6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 175.499.800,-
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.900.000,-
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 158.629.200,-

Pemerintah Daerah.	3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	36.150.000,-
			Rp.	752.688.000,-
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	28.250.000,-
			Rp.	172.473.000,-
Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp.	359.300.000,-
			Rp.	200.000.000,-
Pelayanan Penanaman Modal	8.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Rp.	97.800.712,-
			Rp.	76.813.000,-
Pelayanan Penanaman Modal	9.	Penanaman Modal yang Menurut Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Rp.	76.813.000,-
			Rp.	76.813.000,-

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1. Pengawasan Penanaman Modal	Rp.	262.419.200,-
		2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp.	88.450.000,-
		3. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp.	504.000.000,-
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	11. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.	130.522.000,-

Mataram, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



WAHYU HIDAYAT, S.STP.MAP
NIP. 19860331 200412 1 001

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DPM & PTSP
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



WAHYU HIDAYAT, S.STP.MAP
NIP. 19860331 200412 1 001